

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPSDM HUKUM DAN HAM 2022





Penyusun :
Tim Penyusun LKjIP BPSDM Hukum dan HAM 2022

Diterbitkan oleh
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4
Depok Jawa Barat, 16512
Telp . 021-7540123
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKjIP BPSDM Hukum dan HAM ini adalah wujud akuntabilitas kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai bentuk transparansi dan sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Kementerian. Dalam laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2022, yang disertai target-targetnya dan realisasinya berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya. LKjIP Tahun 2022 ini juga menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2022.

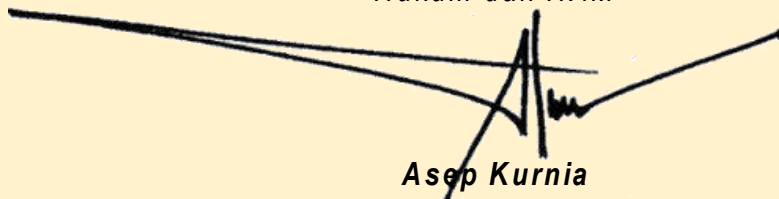
Penyusunan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Tahun 2022 merupakan tahun penerapan adaptasi baru akibat pandemi Covid-19. Berbagai langkah kebijakan dan strategi telah diterapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM agar dapat terus berkinerja pada situasi yang selalu berubah-ubah yang dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan dan prestasi yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM yang telah berkontribusi positif pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

*Kepala Badan Pengembangan SDM
Hukum dan HAM*



Asep Kurnia



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2022 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKjIP merupakan salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga.

Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh BPSDM Hukum dan HAM agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

LKjIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Program (IKP) yang mengukur keberhasilan dari 2 Sasaran Strategis dan 4 Sasaran Program, dengan ringkasan sebagai berikut:



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	88,21%	117,6%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90%	94,5%	105,06%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	85%	90,11%	106,01%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92%	198,86%	216,15%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92%	93,8%	101,9%
2.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105,2%

Sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel di atas, pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021 sebagai berikut:

1. 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis yang ditetapkan melebihi dari target realisasi yang telah ditetapkan;
2. 4 (empat) Indikator Kinerja Program pada Sasaran Program yang telah ditetapkan melebihi dari target realisasi yang telah ditetapkan;



Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, maka capaian kinerja tahun 2022 bisa dikatakan lebih baik hasilnya karena pada tahun anggaran 2021 terdapat dua indikator kinerja pada Sasaran Program yang tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Salah satu indikator kinerja yang meningkat signifikan realisasi dan capaian kinerjanya adalah Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi, dari 92% dari total pegawai Kementerian Hukum dan HAM atau sebanyak 59.673 pegawai, BPSDM Hukum dan HAM mampu menghasilkan realisasi output pengembangan pegawai sebanyak **129.030 peserta** (198,86%) dari jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 64.862 orang. Hal ini tentunya suatu prestasi yang patut menjadi perhatian, karena ditengah pengurangan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui kebijakan *Automatic Adjustmentnya*, ternyata fakta dilapangan tidak mengurangi jumlah output pengembangan kompetensi yang dihasilkan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan pengembangan kompetensi tidak terpaku pada metode klassikal saja tetapi juga metode lainnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi salah satunya dengan melaksanakan webinar dengan berbagai topik serta *Massive Online Open Course* yang bisa menghasilkan banyak output peserta.

Dari sisi anggaran, seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa pada tahun 2022 terdapat kebijakan pengurangan anggaran oleh Kemeterian Keuangan sehingga dari pagu awal yang diterima oleh BPSDM Hukum dan HAM sebanyak **Rp. 284.182.140.000,-** berkurang menjadi **Rp. 229.437.166.000,-**. Dari anggaran yang diterima tersebut BPSDM Hukum dan HAM melakukan realisasi anggaran sebesar **Rp. 225.210.507.498,-** atau **98,16%**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen yang di dalamnya terdapat 9 kegiatan sebagai berikut: Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM

1. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi
2. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan
3. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
4. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)
5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)
6. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)



7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)
8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)

Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BPSDM Hukum dan HAM kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM di masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	9
D. Aspek Strategis	9
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	21
3. Capaian Indikator Kinerja Program	31
B. Realisasi Anggaran	45
C. Capaian Kinerja Anggaran	47
D. Efisiensi Sumber Daya	49
E. Efisiensi Anggaran	51
F. Capaian Kinerja Lainnya	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
C. Rencana Tindak Lanjut	64
Referensi	67



PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Keberadaan BPSDM Hukum dan HAM sebagai sebuah unit kerja setingkat eselon I dengan demikian merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi Aparatur Hukum dan HAM. Tanggung jawab yang semakin besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada data demografi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Kemenkumham memiliki lebih dari 64.000 orang pegawai yang melaksanakan tugas dan

funksinya pada unit-unit Pusat dan Daerah serta ratusan Unit pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Belum lagi tuntutan peran mengiringi perkembangan lingkungan (utamanya eksternal) dimana masyarakat semakin kritis menuntut peran maksimal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik. Dengan demikian organisasi ini tidak lagi sekedar memiliki kewajiban pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM sebaik-baiknya. Perkembangan substansi pengembangan aparatur sipil negara (ASN) seiring berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian menjadi prespektif baru dalam pelaksanaan tugas BPSDM Hukum dan HAM.



Upaya responsif yang kemudian dilakukan adalah kembali mengubah nomenklatur unit kerja ini melalui Permenkumham No. 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan konsidren Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam nomenklatur baru tersebut BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran baru berupa penilaian kompetensi (*assessment*) aparatur sipil negara pada kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan selebihnya dalam nomenklatur baru lebih merupakan penyesuaian agar pelaksanaan tugas menjadi lebih lugas.

Peran dan tanggung jawab baru BPSDM Hukum dan HAM ini sesungguhnya telah dimulai BPSDM Hukum dan HAM jauh sebelum nomenklatur ini berlaku, dimana BPSDM Hukum dan HAM memiliki program pendekatan *competency based human resources management system* (CBHRM), sebagai suatu pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia (SDM),

yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan sistem manajemen SDM. Sistem ini mencakup pengembangan model kompetensi yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM (*competency based training and development*), sehingga kompetensi yang dikembangkan akan tetap sesuai dengan strategi dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM baik *soft skill*, *social skill* dan *mental skill*.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, BPSDM Hukum dan HAM melihat perlunya metode baru dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM sejalan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN. Pada tahun 2020, BPSDM Hukum dan HAM meluncurkan sistem pengembangan kompetensi terintegrasi dalam skema **Kemenkumham Corporate University** yang diwujudkan melalui 4 (empat) pilar yaitu: **Learning Process, Knowledge Manajemen Process, People Process** dan **Network and Partnership Process**. Strategi peningkatan kompetensi SDM melalui **Kemenkumham Corporate University** diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan kehadiran SDM yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kehakiman Nomor YS.4/3/7 Tahun 1975 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman merupakan cikal-bakal organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki peran sebagai unit kerja pengembangan kompetensi aparatur Hukum dan HAM. Seiring perkembangan dan tanggung jawab kementerian maka organisasi ini meningkat peran dan tanggung jawabnya menjadi unit kerja setingkat eselon I, menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan BPSDM Hukum dan HAM.

Sebagai sebuah sub unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, Pusdiklat Departemen Kehakiman memiliki tugas pokok sebatas mendidik dan melatih pegawai Departemen Kehakiman dalam konteks pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Pusdiklat Departemen Kehakiman kemudian berganti nama seiring perubahan kabinet menjadi Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkehham), kemudian menjadi Pusdiklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkumham), dengan tugas pokok, fungsi, dan peran yang sama sebagai unit kerja pengembangan kompetensi pegawai departemen.

Setelah melau perjuangan yang panjang, dimana peran dan tanggung jawab yang semakin besar, unit kerja ini dituntut untuk lebih responsive dengan perkembangan lingkungan, dituntut untuk menjadi sebuah unit kerja yang memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar daripada sekedar unit kerja setingkat Pusat (eselon II). Unit kerja ini kemudian mengalami transformasi menjadi sebuah unit kerja setingkat eselon I yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, tanggal 2 Nopember 2006. Harapan Kementerian Hukum dan HAM untuk kinerja unit kerja ini menjadi tuntutan mutlak terhadap akselerasi perubahan lingkungan eksternal yang berimbas pada kompleksitas dan beban kerja dalam pengembangan SDM Aparatur Hukum dan HAM, untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional di Bidang Hukum dan HAM. Termasuk di dalamnya adalah tuntutan untuk menjadi unit kerja yang membawahi Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP), Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Diklat

Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai
Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

1. Tugas BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Fungsi BPSDM Hukum dan HAM

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 423 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran

pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

c) pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;

e) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

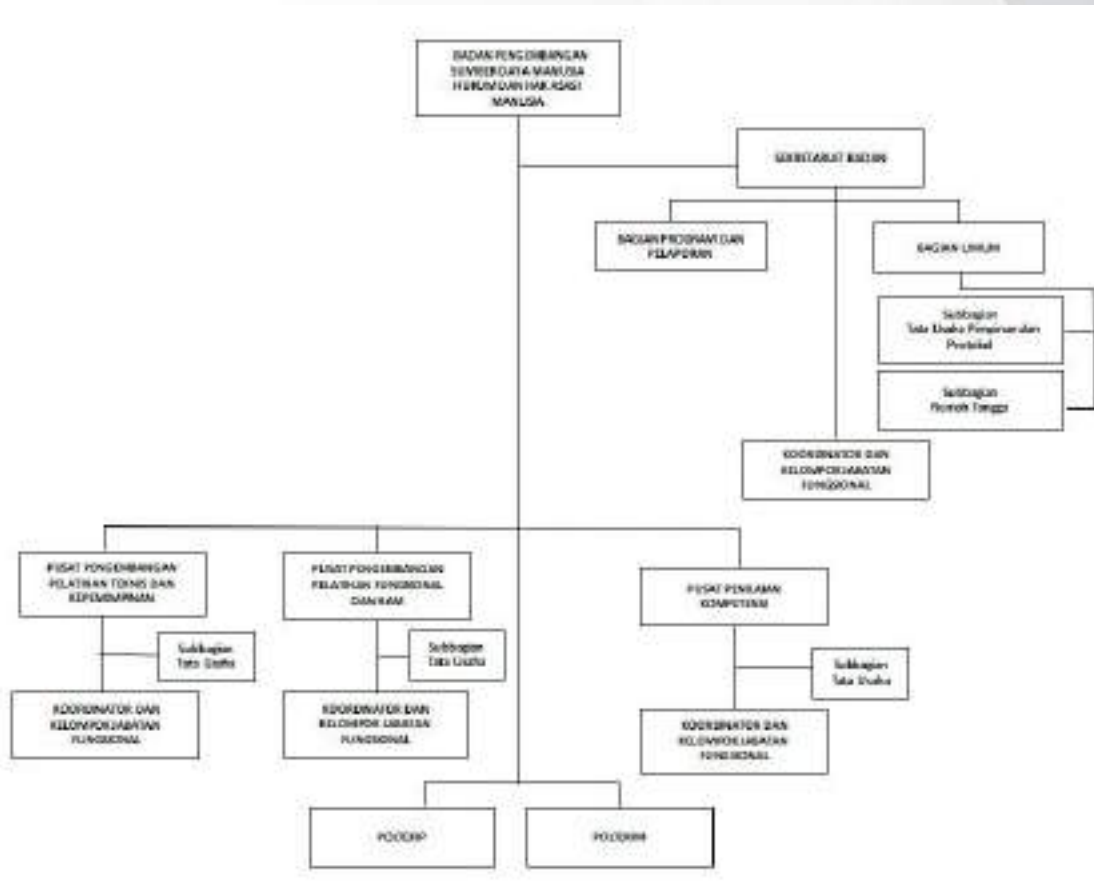
f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

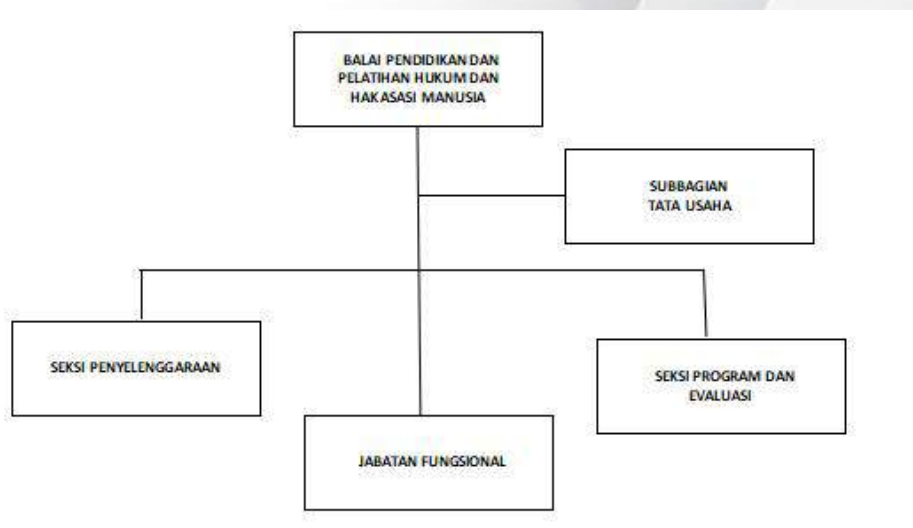
1. Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; pelaksanaan urusan keuangan; pengelolaan urusan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan umum; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan BPSDM Hukum dan HAM; pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang Hukum dan HAM; dan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan BPSDM Hukum dan HAM.
2. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.
3. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; koordinasi dan pembinaan teknis

- substantisi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional dan HAM; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.
4. Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi: penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penilaian kompetensi; penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi; pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi; pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan pelaksanaan urusan tata usaha pusat.
 5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekip memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasarakatan serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasarakatan.
 6. Politeknik Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan kedinasan di bidang keimigrasia. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi : pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian serta melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.
 7. BPSDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Gambar Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM

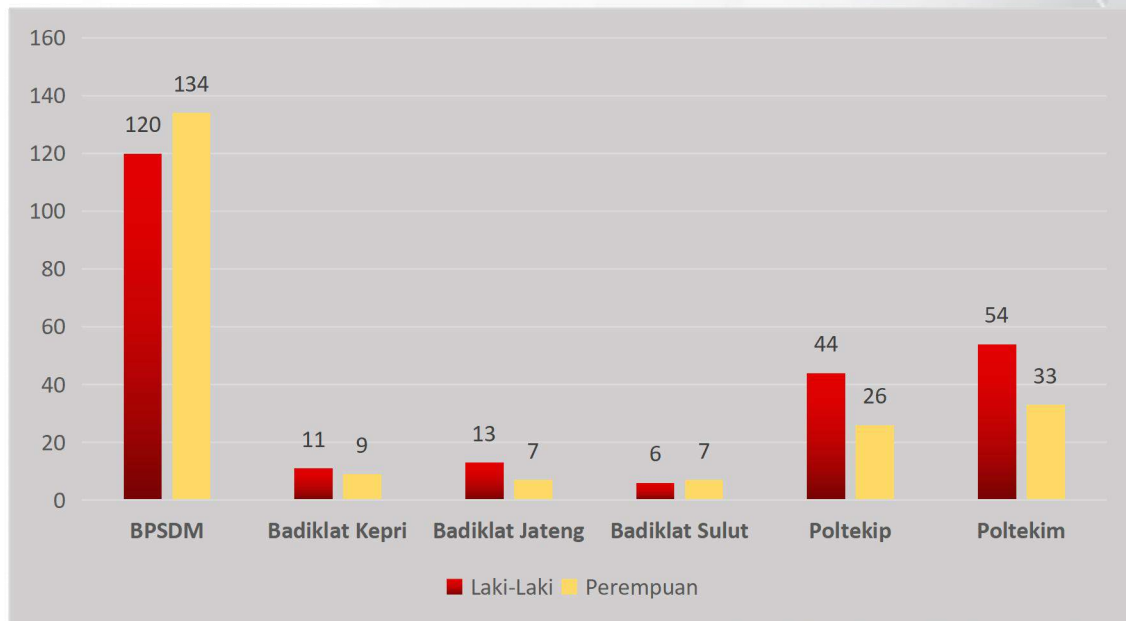


Gambar Struktur Organisasi Balai Diklat Hukum dan HAM

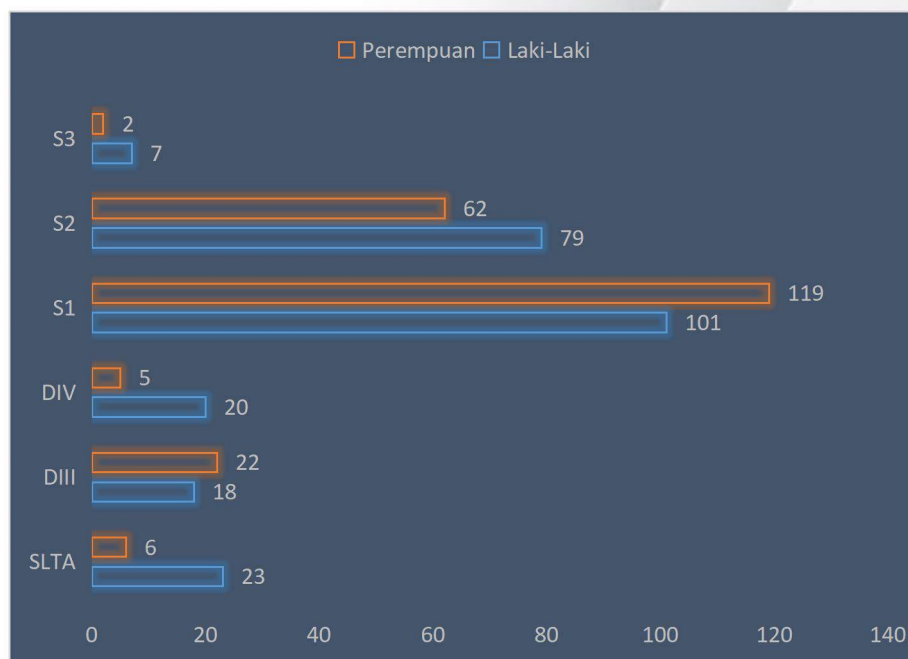


BPSDM Hukum dan HAM untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengembangan SDM di bidang hukum dan HAM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 464 orang dengan berbagai latar pendidikan dan golongan kepangkatan.

Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



C. Maksud dan Tujuan

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan

HAM Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPSDM Hukum dan HAM untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

D. Aspek Strategis

Amanah pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dimandatkan kepada BPSDM Hukum dan HAM tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Peningkatan kualitas SDM aparatur negara merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industry 4.0.

Di sisi lain, tingginya jumlah pegawai tersebut belum diikuti dengan ketersedianya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Pembentukan budaya kerja dalam lingkup sebagai organisasi pembelajar juga harus dikembangkan. Maka dengan tantangan dan desakan zaman, BPSDM Hukum dan HAM berusaha untuk

melakukan penyesuaian, berikut penyesuaian yang ingin diterapkan:

1. Pembangunan SDM bidang hukum dan HAM yang yang berkompetensi tinggi melalui rumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio-kultural SDM Hukum dan HAM melalui rumusan kebijakan dan penyelenggaraan program pengembangan terintegrasi dalam skema *Corporate University*



E. Isu Strategis

Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang

yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

BPSDM sebagai suatu organisasi di bidang pemerintahan, dalam konteks internal kelembagaan memiliki beberapa isu strategis yang bisa menjadi potensi permasalahan

dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada sisi sumber daya manusia masih belum terpetakannya profil kompetensi yang disertai belum maksimalnya analisis jabatan dan beban kerja mengakibatkan belum meratanya kompetensi pegawai, beban kerja yang tidak merata serta penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya.

Disamping hal tersebut terdapat beberapa kompetensi yang masih sangat membutuhkan pengembangan lebih lanjut serta kebutuhan

dalam hal peningkatan etos dan budaya kerja profesional pegawai BPSDM Hukum dan HAM. Pada sisi sarana dan prasarana, meskipun didukung oleh prasarana yang luas dan cukup memadai, tetapi fakta dilapangan kondisi fisik sarana dan prasarana saat ini belum bisa mendukung untuk tercapainya Smart Office dan Smart Class Room. Kondisi asrama baik untuk peserta pelatihan maupun taruna/taruni politeknik sudah mengalami penurunan kualitas yang berdampak pada kualitas proses pembelajaran.



F. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan LKjIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan tugas dan fungsinya penekanan pada aspek peran strategis

BPSDM Hukum dan HAM, serta isu strategis unit organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi

dalam upaya pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja yang telah ditentukan. Disamping menguraikan capaian kinerja, bab ini juga menyajikan data realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Untuk menunjang data realisasi anggaran tersebut maka perlu didukung dengan menyajikan capaian Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART

DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sebagai bentuk pelaporan kinerja, LKJIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 juga menyajikan capaian kinerja lainnya antara lain pengisian data capaian pada beberapa aplikasi monitoring kinerja seperti Aplikasi E-Performance, Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dan e-Monev BAPPENAS serta pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran yang menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

REFERENSI

LAMPIRAN



PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk; mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis

yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang

dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang telah disusun tersebut kemudian diimplementasikan oleh Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang kemudian diturunkan untuk menjadi Rencana Strategis masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
Mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.
2. Perspektif Proses Internal
Perspektif ini mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

4. Perspektif Keuangan atau Disiplin dalam hal keuangan atau disiplin Anggaran anggaran.
Untuk perspektif ini mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi

Tabel Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI 2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi 3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola) 4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir 5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terkreditasi 2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran 3. Menjalin kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

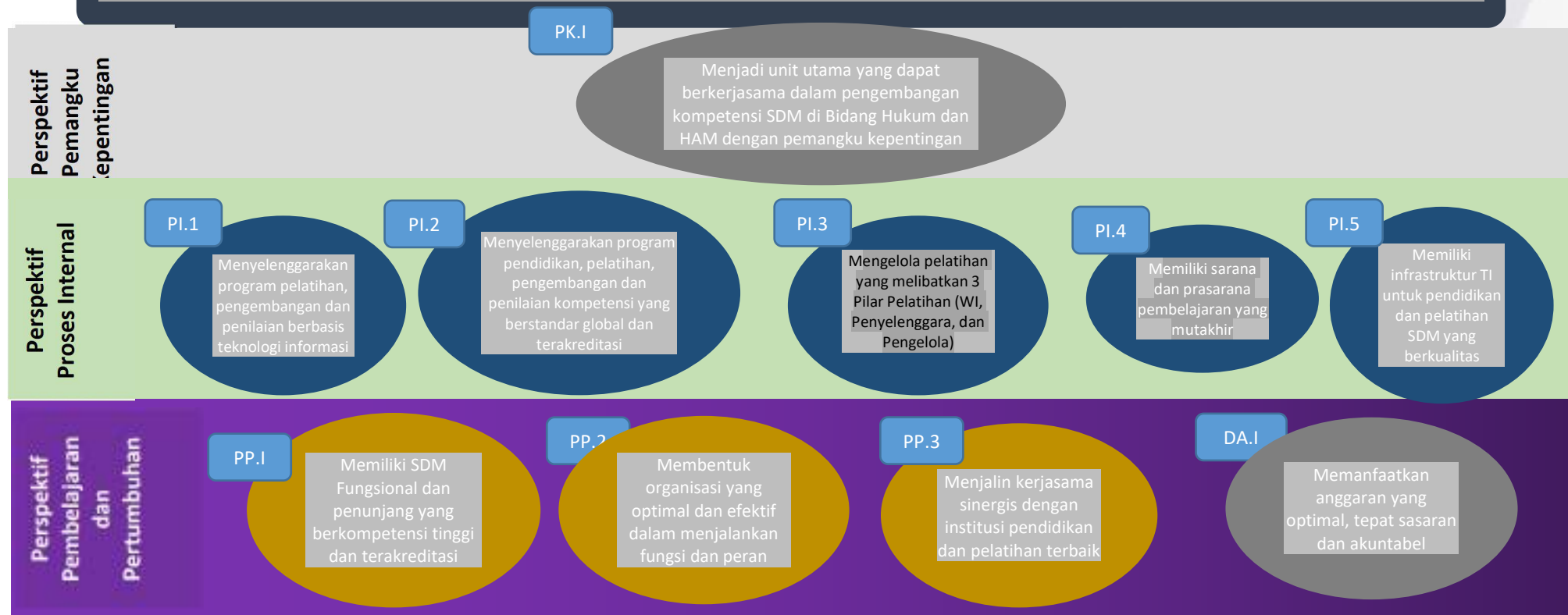
Visi Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Tujuan Strategis BPSDM Hukum dan HAM:

Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University



B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka setiap tahun setiap lembaga pemerintahan diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja antara pimpinan lembaga tersebut dengan atasan langsung sebagai bentuk komitmen penerima amanah (pimpinan lembaga) dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah (atasan pimpinan lembaga) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM



Tabel Sasaran Strategis dan Sasaran Program Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	75%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90%
Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	85%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%

Untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tiap-tiap indikator pada sasaran strategis dan sasaran program tersebut, BPSDM Hukum dan HAM pada awal tahun diberikan pagu tahun 2022 sebesar Rp. 284. 700.693.994,-. Namun dalam tahun

anggaran berjalan terjadi kebijakan Automatic Adjustment oleh Kementerian Keuangan yang berimbas pada pengurangan anggaran BPSDM Hukum dan HAM menjadi Rp. 229.437.166.000,- yang terbagi menjadi 9 rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel Anggaran Per Kegiatan Tahun 2022

013.01. WA	Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)	Pagu Anggaran (Akhir)
1620	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)	Rp. 43.093.826.000,-	Rp. 41.024.600.000,-
1620	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)	Rp. 40.811.580.000,-	Rp. 40.605.465.000,-

1621	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 29.445.585.000,-	Rp. 9.964.138.000,-
1622	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 3.827.200.000,-	Rp. 2.881.200.000,-
1623	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 26.761.066.000,-	Rp. 11.887.966.000,-
1624	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 59.621.885.000,-	Rp. 75.033.005.000,-
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 22.514.685.000,-	Rp. 11.434.479.000,-
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp. 27.499.928.000,-	Rp. 20.999.928.000,-
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 30.606.385.000,-	Rp. 15.606.385.000,-
JUMLAH		Rp. 284.182.140.000,-	Rp. 229.437.166.000,-

Tabel Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Awal)	Pagu Anggaran (Akhir)
1.	Belanja Pegawai	Rp. 32.635.071.000,-	Rp. 34.211.419.000,-
2.	Belanja Barang	Rp. 246.068.069.000,-	Rp. 171.568.647.000,-
3.	Belanja Modal	Rp. 5.479.000.000,-	Rp. 23.657.100.000,-
Total		Rp. 284.182.140.000,-	Rp. 229.437.166.000,-



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Suatu kinerja pada umumnya harus memiliki kriteria atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu bisa berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan atau target yang telah ditetapkan tersebut kinerja seseorang ataupun organisasi bisa diukur tingkat keberhasilannya. Dan setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan

Akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan Rencana Kerja 2021 BPSDM Hukum dan HAM untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2021.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% ditandai dengan warna merah

Range	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna
> 100%	Melebihi Target	
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	
< 100%	Tidak Tercapai	

Berikut hasil pengukuran untuk realisasi dan capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dan sasaran

program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM:

Tabel Capaian IKU Sasaran Strategis dan Sasaran Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	75%	88,21%	117,6%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90%	94,5%	105,06%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	85%	90,11%	106,01%
		2. Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	92%	198,86%	216,15%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	92%	93,8%	101,9%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105,2%
Total			165%	665,48%	751,92%

Formulasi	<u>Total Nilai Capaian</u> Jumlah Indikator Kinerja <u>751,92</u> 6
Nilai Kinerja Organisasi	125,32

Tabel capaian indikator kinerja diatas memberikan informasi bahwa seluruh indikator kinerja yang menjadi tugas BPSDM Hukum dan HAM telah melebihi dari target yang ditetapkan, dengan kata lain pada tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

pengembangan kompetensi SDM bidang hukum dan HAM dengan baik. Hal ini juga bisa dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSDM Hukum dan HAM sebesar 125,32 Nilai NKO tahun 2022 lebih besar dari NKO tahun 2021 yang mencapai sebesar 109,1.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 diimplementasikan melalui Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian salah satu misi Kementerian Hukum dan HAM **“Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan”**, serta mengampu 1 Sasaran Strategis Menteri Hukum dan HAM yaitu Sasaran Strategis 7 **“Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM”**.

Dalam sasaran strategis tersebut terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Hukum dan HAM yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

- Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

- Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Didalam rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, BPSDM Hukum dan HAM mengemban tugas untuk mengimplementasikan misi Kementerian Hukum dan HAM **“Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan”** yang dituangkan pada sasaran strategis **“Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM”**. Sasaran strategis ini sejalan dengan sasaran RPJMN 2020-2024 **Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi** yang juga searah dengan salah satu dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan pemerintahan periode kedua Jokowi **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Memperkuat transformasi pelayanan publik

tidak akan berhasil jika tidak ditopang dengan SDM yang berkompetensi sesuai dengan tuntutan perubahan itu sendiri.

Berikut penjelasan dan identifikasi

capaian pada masing-masing indikator kinerja utama pada sasaran strategis tersebut:

- **IKU -1 Presentase ASN Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan**

Gambar Penilaian Kompetensi Secara Online



Salah satu indikator tercapainya sasaran strategis ini adalah **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan**. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah persentase ASN di bidang hukum dan HAM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap ASN wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi teknis. BPSDM Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab atas capaian indikator ini telah melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap aparatur di bidang hukum dan HAM untuk mengukur capaian indikator kinerja ini, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kegiatan Penilaian Kompetensi

No	KEGIATAN	Peserta	Peserta memenuhi standar kompetensi jabatan	%
PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI BAGI JABATAN ADMINISTRASI/FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM				
1	Penilaian Kompetensi Kanwil Sumatera Barat	60	60	100%
2	Penilaian Kompetensi Kanwil Bengkulu	60	60	100%
3	Penilaian Kompetensi Kanwil Sulawesi Tengah	60	60	100%
4	Penilaian Kompetensi Kanwil Bangka Belitung	60	60	100%
5	Penilaian Kompetensi Kanwil Jawa Barat	60	60	100%
6	Penilaian Kompetensi Kanwil Jawa Timur	60	60	100%
7	Penilaian Kompetensi Kanwil Papua Barat	60	60	100%
8	Penilaian Kompetensi Kanwil Sulawesi Utara	80	60	75%
9	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian dan Pengangkatan JF Analis Keimigrasian & Penilaian Kompetensi di Lingkungan Ditjen Imigrasi (Pemetaan)	76	62	82%
10	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi di Lingkungan Badiklat Jawa Tengah	16	15	94%
11	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten - Administrator	11	11	100%
12	Penilaian Kompetensi dan Potensi Bagi Administrator Dalam Rangka Manajemen Talenta di Lingkungan Kemenkumham	88	88	100%
13	Penilaian Kompetensi Pada Pelaksanaan Pindah Instansi Ke Dalam Kementerian Hukum Dan HAM TA 2022	112	83	74%
14	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	4	4	100%
Total		500	728	95%
PENILAIAN KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM				
1	Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal	102	90	88%
2	Penilaian Kompetensi Penyesuaian/ Inpasing JF Kurator Keperdataan di 3 (Tiga) Wilayah di Lingkungan Ditjen AHU	15	15	100%
3	Penilaian Kompetensi Pengangkatan Dalam JF Analis Keimigrasian Ahli Utama dan Analis Hukum Ahli Utama	2	2	100%
4	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri di lingkungan Ditjen KI	36	27	75%
5	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jab Fungsional Widyaiswara Utama dan Analis Hukum Utama	2	2	100%
6	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM	2	2	100%

7	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang JF Analis Keimigrasian , Pemeriksa Keimigrasian dan Pengangkatan JF Analis Keimigrasian & Penilaian Kompetensi di Lingkungan Ditjen Imigrasi (Pemetaan)	67	30	45%
8	Penilaian Kompetensi dan Potensi Bagi JF Ahli Madya Dalam Rangka Manajemen Talenta di Lingkungan Kemenkumham	255	110	43%
9	Penilaian Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama Pembimbing Kemasyarakatan	3	3	100%
10	Penilaian Kompetensi Auditor Ahli Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal	1	1	100%
11	Penilaian Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Melalui Perpindahan Jabatan Ke Jenjang Ahli Utama	1	1	100%
12	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	1	1	100%
13	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Banten - JF Ahli Madya	17	7	41%
14	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	9	9	100%
15	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional Perancang dan Penyuluh Hukum Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	2	100%
		400	126	86%
PENILAIAN PREFERENSI KOMPETENSI DENGAN METODE ONLINE				
1	Penilaian Preferensi Gelombang I	3000	2774	92%
2	Penilaian Preferensi Gelombang II	3300	2503	76%
3	Penilaian Preferensi Gelombang III	3500	2645	76%
4	Penilaian Preferensi Gelombang IV	3750	3595	96%
Total		13550	11517	85%
PENILAIAN PREFERENSI KOMPETENSI DENGAN METODE ONLINE NON DIP				
1	Inpassing Analis Hukum (SJT & CBT)	425	376	88%
Total		425	376	88%
Grand Total		14450	12747	88.21%

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12.747}{14.450} \times 100\%$$

$$Realisasi = 88,21\%$$

$\sum N$ = Jumlah peserta penilaian kompetensi yang memenuhi standar kompetensi jabatan
 $\sum X$ = jumlah peserta penilaian kompetensi

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-1, hasil realisasi tersebut kemudian

dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{88,21}{75} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 117,6\%$$

Tabel Capaian IKU-1

SASARAN STRATEGIS:		
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA:		
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
75%	88,21%	117,6%

Tabel Realisasi IKU-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
28,35	13,95	45,91	-

Berdasarkan target yang ditetapkan IKU **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan** ditetapkan sebesar 75%. Adapun realisasi yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan adalah sebesar 88,21%. Dari realisasi yang diperoleh maka capaian kinerja untuk indikator kinerja utama ini sebesar 117,6%, dengan kata lain untuk indikator ini BPSDM Hukum dan HAM telah melebihi target yang telah ditentukan. Adapun hal yang menyebabkan realisasi dapat melampaui target adalah:

1. Sebagian besar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Asal

peserta telah memahami seutuhnya pedoman pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, sehingga PPK merespon dengan mengeluarkan tindak lanjut atas hasil tersebut dalam bentuk mutasi, rotasi, usulan pengembangan kompetensi, dan seterusnya;

2. Pada Tahun 2022 Pusat Penilaian Kompetensi melakukan kegiatan *Feedback* Hasil penilaian Kompetensi ke Kantor Wilayah secara sampling dan aktif berkoordinasi dengan Instansi Pembina Kepegawaian Instansi asal peserta.

Tabel Perbandingan Capaian IKU-1

Indikator Kinerja Utama	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%	96,87%	138,38%	75%	88,21%	117,6%

Namun demikian Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditentukan.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama ini antara lain:

1. Masalah jaringan terutama ketika proses wawancara, sehingga mengganggu fokus assessor dan peserta;
2. Akses jaringan yang bermasalah juga menjadi kendala dalam proses pelaksanaan e-psikotes. Kuota Peserta diatas 100 orang dalam satu kali kegiatan psikotes membuat aplikasi kinerjanya menjadi lambat;
3. Kurangnya SDM dalam kegiatan administrasi dan pelaksanaan dibidang penyelenggara sehingga membutuhkan bantuan dari sub bidang lainnya;
4. Beberapa peserta masih kesulitan dalam mengikuti proses Assesment Virtual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menuntun peserta tersebut hingga mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan;
5. Pada saat pelaksanaan penilaian kompetensi, peserta terkendala dengan

jumlah pertanyaan dalam Q.Com (quisioner kompetensi) dan CI (Critical insiden)

Sebagai perbaikan penyelenggaraan penilaian kompetensi di tahun yang akan datang, kegiatan Penilaian Kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian kompetensi merupakan laporan yang bersifat rahasia dan diharapkan dapat diserahkan kepada individu masing-masing untuk dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang menunjang kinerja pegawai dan disimpan kedalam *data base* Pusat Penilaian Kompetensi. Agar dapat proses Assesment dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditingkatkan dalam hal kualitas akses jaringan internet baik di BPSDM selaku Instansi Penyelenggara dan juga instansi asal peserta, *upgrade*/perbaikan aplikasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar aplikasi semakin cepat dan minim kendala saat digunakan dalam jumlah peserta yang masif.

Untuk mengatasi beban kerja Assesor seiring bertambahnya pegawai yang harus diuji kompetensi baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kemenkumham, maka perlu menambah jumlah tenaga

Assessor maupun Pelaksana yang ada di lingkungan Pusat Penilaian Kompetensi agar target penilaian kompetensi dapat tercapai seefektif mungkin dengan metode *Assesment center* yang terstandarisasi;

Untuk mengatasi kendala dalam penggunaan aplikasi uji kompetensi secara

online maka perlu adanya informasi yang cukup jelas kepada peserta penilaian kompetensi dalam penggunaan aplikasi penilaian kompetensi melalui video tutorial. Serta perlu adanya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya virtual.

• IKU -2 Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit eselon I yang memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan kompetensi di bidang hukum dan HAM melalui berbagai pelatihan. Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan tersebut adalah peningkatan kompetensi peserta pelatihan yang berdampak pada peningkatan kinerja alumni pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan. Untuk melihat apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak maka perlu dilakukan pengukuran persentase banyaknya alumni diklat yang meningkat kinerjanya.

Peningkatan Kinerja dari alumni pelatihan diukur berdasarkan peningkatan kompetensi yang didapatkan peserta dari pelatihan yang diikuti dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh alumni, yang terdiri dari *Skill* (Keterampilan), *Knowledge* (Pengetahuan), dan *Attitude*

(Sikap). Penilaian tersebut diukur berdasarkan persepsi Alumni, Atasan Langsung dan Rekan Kerja.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan terhadap responden alumni pelatihan secara sampling. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan berpedoman pada Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-63.SM.01.04 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan, dan Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-01.SM.01.04 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner IKU-2

No	Satuan Kerja	Jumlah Responden	Jumlah Alumni Meningkat Kinerjanya	Pelatihan
1	Pusbanglat Fungham	1.995	1.845	Analisis Keimigrasian, PK Bapas, Analisis Kepegawaian, Arsiparis, Perancang, Penyuluh

				Hukum
2	Pusbanglat Tekpim	1.573	1.528	Latsar CPNS, PKP, PKA, PKN
3	Badiklat Kepri	1.183	1.137	Petugas Pengamanan Tingkat Dasar, Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan, Teknik Dan Strategi Membangun Publikasi, Teknis Latihan Kerja Dan Kegiatan Kerja Produksi , Latsar Cpnas Dokumen Perjalanan RI,
4	Badiklat Jateng	200	185	Protokoler, Publikasi, Kesamaptaa, Status Imigrasi dan Pendetensian dan Deportasi
5	Badiklat Sulut	856	796	Latsar CPNS, Kesamaptaa, Protokoler, Pengamanan Tingkat Dasar/Llanjutan, Kehumasan dan SPIP
	Total	5.807	5.491	

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5.491}{5.807} \times 100\%$$

$$Realisasi = 94,5\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden yang meningkat kinerjanya
 $\sum X$ = jumlah responden

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya sebesar 94,5%.**

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-2, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{94,5}{90} \times 100\%$$

$$Capaian = 105,06\%$$

Gambar Evaluasi Pasca Pelatihan



Tabel Capaian IKU-2

SASARAN STRATEGIS:		
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA:		
Persentase alumni Diklat yang meningkat kinerjanya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
90%	94,5%	105,06%

Tabel Realisasi IKU-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
20,4	24,7	23,7	25,7

Tabel Perbandingan Capaian IKU-2

Indikator Kinerja Utama	2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	85%	96,89%	113,9%	90%	94,5%	105,06%

Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase alumni Pendidikan dan pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah 105,6% yang artinya melebihi target yang ditetapkan,

hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca

pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar capable dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.

Namun jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditentukan, hal ini karena masih terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Pada saat pengisian kuesioner secara daring, beberapa responden tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan;
2. Beberapa pelatihan baru bisa diukur hasilnya setelah 6 bulan sejak pelatihan

berakhir, sehingga tidak banyak responden pelatihan yang dapat diukur;

3. Beberapa peserta mendapatkan promosi atau mutasi ke tempat kerja baru sebelum dilakukan evaluasi pasca pelatihan;
4. Indikator peningkatan kinerja masih sebatas pengamatan dan pendapat pribadi dari atasan/rekan sejawat/bawahan alumni sehingga lebih bersifat subjektif dan belum bersifat *evidence base*;

Disamping membandingkan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya. Berikut disajikan perbandingan target dan capaian indikator kinerja utama ini dengan instansi lain yang memiliki indikator serupa antara lain Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat MA

Tabel Perbandingan IKU-1 Dengan Instansi Lain

INSTANSI	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BPSDM	-	-		85%	96,89%	113,9%	90%	94,5%	105,06%
BPPK	90%	99,36%	110,4%	80%	89,34%	111,6%	82%	-	-
BALITBANG	N/A	N/A	N/A	4	4,15	103,75%	N/A	N/A	N/A
DIKLAT MA				(skala)	(skala)				

Sebagai perbaikan di tahun yang akan datang dalam memperoleh realisasi capaian indikator kinerja utama ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan kedalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG;
2. Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak;
3. Perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang mengatur Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dapat diaplikasikan pada seluruh pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM

Hukum dan HAM dan satuan kerjanya,

baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring;

3. Capaian Indikator Kinerja Program

Disamping memenuhi target pada indikator kinerja Sasaran Utama, kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 juga diukur dan diimplementasikan melalui program dukungan manajemen dalam rangka mencapai Sasaran Program **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM dan Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian** yang diukur berdasarkan capaian pada Indikator Kinerja Program :

1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna
2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya
4. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja program dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

● IKP-1 Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna

Indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan oleh unit pengguna. Adapun Unit Kerja yang dijadikan sampel survei sebanyak 5 Kantor Wilayah, dan 8 Unit Pusat Eselon 1. Bentuk Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi yang paling banyak dilakukan adalah Coaching dan Mentoring, sedangkan yang paling sedikit adalah bentuk pengembangan dengan metode datasering (penempatan

pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu).

Dalam pencapaian indikator ini diperoleh dari rekapitulasi data survei Monitoring dan data dukung untuk memvalidasi data berupa dokumen seperti Surat Keputusan ataupun sertifikat kegiatan yang telah dilakukan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang telah diberikan.

Untuk mencari nilai realisasinya maka dilakukan survey monitoring pemanfaatan hasil penilaian kompetensi kepada

beberapa Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut

Tabel Realisasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi

No.	Unit Kerja/Kanwil	Responden	Hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti
1.	Jawa Tengah	93	93
2.	Bali	58	58
3.	Nusa Tenggara Barat	60	60
4.	Riau	60	52
5.	Sulawesi Tenggara	56	56
6.	Inspektorat Jenderal	83	69
7.	Maluku	54	54
8.	Sumatera Barat	60	44
9.	Ditjen PP	10	8
10.	Papua Barat	59	38
11.	BPHN	3	3
12.	BPSDM	8	8
13.	Balitbang	18	18
TOTAL		617	556

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{556}{617} \times 100\%$$

$$Realisasi = 90,11\%$$

$\sum N$ = Jumlah data kuesioner yang ditindaklanjuti
 $\sum X$ = Jumlah data kuesioner yang disebar

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna** sebesar 90,11%.

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-1, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{90,11}{85} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 106,0$$

Tabel Capaian IKP-1

SASARAN PROGRAM:		
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
85%	90,11%	106,01

Tabel Realisasi IKP-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
48,89	0,87	27,4	12,9

Realisasi pada indikator ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 85%,

sehingga untuk tahun 2022 capaian kinerja pada indikator ini sebesar 106,01%.

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-1 2020-2022

2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
75%	81%	108%	80%	76,43%	95,53%	85%	90,11%	106,01%

Capaian yang melebihi diatas target atas realisasi Indikator ini adalah semakin tingginya pemahaman Pembina Kepegawaian Instansi asal peserta bahwa hasil penilaian kompetensi harus dilakukan ditindaklanjuti agar dapat memberikan manfaat bagi peserta maupun organisasi. Selain itu Pusat penilaian Kompetensi aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembina kepegawaian Instansi asal peserta baik melalui koordinasi maupun

kegiatan *feedback* ke Kantor Wilayah yang dilaksanakan selama tahun 2022.

Jika kita bandingkan hasil pencapaian indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** pada tahun 2022 dengan hasil pencapaian pada tahun 2021, maka dapat kita lihat terdapat kenaikan capaian kinerja.

Dari tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2021 realisasi pada indikator ini kurang

dari target yang telah ditetapkan, sementara untuk realisasi pada tahun ini di atas target yang telah ditentukan. Diharapkan untuk tahun berikutnya BPSDM Hukum dan HAM khususnya Pusat Penilaian Kompetensi untuk bisa meningkatkan pengawasan atas tindak lanjut hasil penilaian kompetensi sehingga realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini bisa sesuai target ataupun melebihi dari target realisasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi masih banyak Unit Kerja dan Kantor Wilayah belum menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi pegawainya oleh karena itu kedepannya perlu langkah-langkah antara lain:

1. Tindak lanjut hasil penilaian kompetensi dan monitoring dari Pejabat Pembina

kepegawaian atas hasil penilaian kompetensi pegawai di jajarannya, khususnya bagi pegawai yang masih belum mencapai standar kompetensi jabatan agar ditindaklanjuti melalui pengembangan berupa pelatihan maupun bentuk pengembangan lainnya;

2. Sosialisasi kepada seluruh user (unit pengguna) agar menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan kedalam perencanaan pengembangan dan perencanaan pola karir pegawai;
3. Berkoordinasi intens dengan Biro kepegawaian selaku PYB terhadap tindaklanjut hasil penilaian kompetensi.

● IKP-2 Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi

Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi selama 20 Jam Pelajaran (JP) setiap tahunnya. Dalam usaha untuk memenuhi kewajiban institusi dalam mengembangkan kompetensi pegawainya . Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM menetapkan target pengembangan kompetensi di dalam Rencana Strategis 2020-2024 yang telah disusun.

Pada tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM melalui satuan kerja di bawahnya

memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan target 92% dari jumlah PNS Kementerian Hukum dan HAM. Untuk memenuhi target tersebut BPSDM Hukum dan HAM melalui unit dan satuan kerja di bawahnya telah menyusun dan melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Selain mengembangkan kompetensi pegawai melalui bentuk pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum dan HAM juga

menggunakan strategi *Corporate University*, yang diluncurkan pada tahun 2019, untuk mengembangkan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menerapkan strategi ini jangkauan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM lebih besar dan luas, karena bentuk kegiatan pengembangan kompetensi tidak hanya sebatas pelatihan dan pendidikan klasikal saja tetapi bisa dalam bentuk lainnya. Untuk tahun 2022, implementasi strategi *Corporate University* diterapkan pada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

dalam bentuk penyelenggaraan workshop/sosialisasi/bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dan UPT yang telah ditetapkan menjadi Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022.

Berikut data capaian output dari program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik melalui unit dan satuan kerjanya maupun melalui strategi *Corporate University* di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham selama tahun 2022

Tabel Capaian Output Pengembangan Kompetensi

No.	Unit / Satker	Pengembangan Kompetensi			Total
		Pelatihan	Pendidikan	Non-Diklat	
1	Pusbanglat Tekpim	9.285	-	30.407	39.692
2	Pusbanglat Fungham	2.882	-	61.291	64.173
3	Badiklat Sulut	1.774	-	553	2.327
4	Badiklat Jateng	2.012	-	3.951	5.963
5	Badiklat Kepri	1.662	-	1.400	3.062
6	Poltekip	-	300	-	300
7	Poltekim	-	290	-	290
8	Kantor Wilayah	-	-	13.223	13.223
Total		17.615	590	110.825	129.030

Tabel di atas menunjukkan bahwa total output pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2022 sebesar **129.030** orang telah mengikuti pengembangan kompetensi dengan berbagai metode. Dengan total jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sebesar 64.862 pegawai dan target pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022

sebesar 92% dari jumlah pegawai, maka jumlah target pegawai Kemenkumham yang harus mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak **59.673** pegawai. Dari data pada tabel di atas maka bisa diukur realisasi capaian indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** dengan penghitungan sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{129.030}{64.862} \times 100\%$$

$$Realisasi = 198\%$$

$\sum N$ = Jumlah pegawai yang memperoleh pengembangan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah pegawai Kemenkumham

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** sebesar 184,65%. Kemudian

untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-2, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{198,86}{92} \times 100\%$$

$$Capaian = 216,15\%$$

Tabel Capaian IKP-2

SASARAN PROGRAM:		
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
92%	198,86%	216,15%

Tabel Realisasi IKP-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
10	30	30	129

Grafik Target Capaian IKP-2



Jumlah ASN
Kemenkumham



Persentase Target
Pengembangan Kompetensi



Angka Target
Pengembangan Kompetensi

*sumber:simpeg kemenkumham

Grafik Realisasi Capaian IKP-2



**Jumla Realisasi
Pengembangan Kompetensi**



**Persentase Realisasi
Pengembangan Kompetensi**

Dari penyajian data pada tabel dan grafik diatas, dapat dilihat realisasi untuk Indikator Kinerja Program Presentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi di tahun 2022 **melebihi** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, ditengah-tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung serta adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang berimbas pada pemangkasan anggaran pengembangan kompetensi, BPSDM Hukum

dan HAM mampu menghasilkan capaian output yang melebihi dari target yang ditentukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan kompetensi menjadi penyebab meningkatnya capaian output pengembangan kompetensi seperti :

1. Penyelenggaraan Webinar dengan berbagai macam topik;
2. *Community of Practice (CoP)*
3. *Massive Online Open Course ()* melalui laman <https://mooc.kemenkumham.go.id>

Gambar Laman MOOC Kemenkumham



Gambar Webinar Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Gambar *Community of Practice* Badiklat Hukum dan HAM Kep. Riau

Pelaksanaan bentuk lain pengembangan kompetensi seperti Webinar, MOOC, dan CoP yang dilakukan BPSDM Hukum dan HAM dan Badiklat Hukum dan HAM memaksimalkan output capaian pengembangan kompetensi karena kegiatan tersebut memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi, sehingga dapat diikuti pegawai Kementerian Hukum dan HAM

secara masif dengan biaya yang murah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 maka realisasi pada tahun 2022 lebih besar 115,96%. Berikut perbandingan capaian Indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** tahun 2020, 2021 dan 2022

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-2 2020-2022

2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	70%	82,3%	90%	82,9%	92,1%	92%	198,86%	216,15%

Meskipun realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini sangat istimewa, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Kualitas yang jaringan internet yang kurang pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti PJJ, e-learning, Webinar dan MOOC;
2. Beberapa peserta pada pelatihan metode e-learning tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan;
3. Beberapa kurikulum dan modul sudah tidak relevan dengan situasi terkini;
4. Hasil output pengembangan kompetensi belum terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG.

Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Memaksimalkan pelaksanaan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi diluar pelatihan klasikal seperti MOOC, Webinar, CoP, dan seterusnya sehingga dapat menjangkau seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan masiv dan berbiaya murah;
2. Menghimbau para atasan langsung peserta pelatihan *e-learning* untuk terus memantau progres pelatihan yang sedang diikuti oleh peserta;
3. Implementasi aplikasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) pada Kantor Wilayah dan Unit Pusat agar setiap kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bisa terdata;
4. Koordinasi dengan Biro Kepegawaian untuk mengintegrasikan hasil pengembangan kompetensi dengan aplikasi SIMPEG

● IKP-3 Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya

Salah satu indikator untuk mengukur Sasaran Program Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia di

Bidang Hukum dan HAM adalah **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai**

dengan kompetensi bidang tugasnya. Indikator kinerja program ini bertujuan mengukur sejauh mana peserta pelatihan setelah kembali melaksanakan tugas di unit organisasi asalnya sudah sesuai dengan kompetensi yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan.

Hal ini agar hasil pelatihan yang telah diikuti oleh alumni pelatihan menjadi kompetensi pegawai tersebut dan dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan pengembangan

kompetensi berhasil guna baik untuk pribadi alumni maupun organisasi asal alumni.

Untuk itu unit dimana alumni tersebut bertugas diharapkan menempatkan alumni pelatihan di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui kuesioner evaluasi pasca pelatihan oleh unit/satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM kepada beberapa responden dengan hasil di bawah ini.

Tabel Realisasi Tindak Lanjut Penempatan Alumni Pelatihan

Satker	Responden	Penempatan Responden Sesuai Kompetensi	Persentase
Pusbang Fungham	1.945	1.824	93,7
Pusbang Tekpim	1.573	1.495	95,04
Badiklat Kep. Riau	1.183	1.104	93,3
Badiklat Jawa Tengah	200	185	92,66
Badiklat Sulawesi Utara	856	796	92,9
Total	5.757	5.404	93,8

Dari data pada tabel diatas, kemudian dilakukan penghitungan capaian realisasi untuk indikator kinerja ini dengan formulasi sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5.404}{5.757} \times 100\%$$

$$Realisasi = 93,8\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden alumni pelatihan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah responden alumni

Dari penghitungan diatas maka realisasi untuk indikator **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** sebesar 93,8%. Kemudian untuk

memperoleh capaian kinerja pada IKP-3, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{93,8}{92} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 101,9\%$$

Tabel Capaian IKP-3

SASARAN PROGRAM:		
Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
92%	93,8%	101,9%

Tabel Realisasi IKP-3 Pertriwulan

1	Q2	Q3	Q4
20	30	30	13,8

Dari hasil pengolahan survey evaluasi pasca pelatihan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM diperoleh hasil realisasi indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** sebesar 93,8%. Realisasi ini lebih besar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yaitu sebesar 92% alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya. Dari realiasi target tersebut, kemudian dapat kita ketahui capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada indikator kinerja ini sebesar **101,9%**. Capaian diatas target ini disebabkan :

1. Peserta yang dikirimkan sesuai dengan kompetensi jabatan yang menjadi prasyarat pelatihan;
2. Kurikulum dan modul telah direview dan diupdate sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenis pelatihan dan sesuai dengan isu aktual sehingga dapat diaplikasikan oleh alumni peserta pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Materi pelatihan disertai dengan praktek dan simulasi

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-3 2020-2022

2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	96%	113%	90%	98,5%	109,5%	92%	93,8%	101,9%

Tabel perbandingan di atas memberikan informasi bahwa dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 untuk indikator ini

mengalami penurunan sebesar 7,6% dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 98,5%.

- **IKP-4 Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan**

Gambar Wisuda Taruna Politekip dan Poltekim



Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) bertujuan untuk menciptakan kader imigrasi dan pemasaryakatan yang akan bertugas

pada Unit/Satuan Kerja maupun UPT Imigrasi dan Pemasaryakatan. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasaryakatan dan Keimigrasian.

Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) bertujuan untuk menciptakan kader imigrasi dan pemasarakatan yang akan bertugas

pada Unit/Satuan Kerja maupun UPT Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian.**

Penempatan lulusan Politeknik Imigrasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: Sdm.6-6471.SM.10.04 Tahun 2022 Tentang Hasil Yudisium Diploma IV Peserta Didik Tingkat IV Politeknik Imigrasi Tahun Akademik 2022, Politeknik Imigrasi telah mewisuda sebanyak 290 taruna berdasarkan total prestasi hasil pembelajaran dengan metode pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan pada lajur 5 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Studi Hukum Keimigrasian sebanyak 149 orang;
2. Program Studi Administrasi Keimigrasian sebanyak 106 orang;
3. Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian sebanyak 35 orang.

Berdasarkan SK CPNS yang diterima masing-masing wisuda, keseluruhan wisuda ditempatkan pada unit kerja dan satuan kerja bidang keimigrasian dengan rincian sebagai berikut:

- 15 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM sebagai Pembina Taruna/Taruni Poltekim;
- 24 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 251 orang lulusan pendidikan kedinasan Politeknik Imigrasi ditempatkan di Kantor Imigrasi yang tersebar di wilayah Indonesia

Penempatan lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, tahun 202 telah meluluskan sebanyak 300 orang. Sesuai dengan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.03-645 tahun 2022 tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Angkatan 53 Tahun Akademik 2022 yang terdiri dari :

1. Program Studi Manajemen Pemasarakatan sebanyak 100 orang;
 2. Program Studi Teknik Pemasarakatan sebanyak 109 orang;
 3. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan sebanyak 91 orang
- Berdasarkan SK CPNS masing-masing lulusan tersebut ditempatkan dan di tugaskan

ke berbagai UPT Pemasyaratakan sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Tabel Realisasi Penempatan Lulusan Politeknik

Politeknik	Lulusan	Penempatan Lulusan Sesuai Kompetensi
POLTEKIP	300	300
POLTEKIM	290	290
Total	590	590

Dari data tersebut, kemudian di lakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{590}{590} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

$\sum N$ = Jumlah lulusan Poltekip/Poltekim yang ditempatkan sesuai kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah lulusan Poltekip/Poltekim

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan** sebesar 100%.

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-4, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$Capaian = 105,2\%$$

Tabel Capaian IKP-4

SASARAN PROGRAM:		
Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasyaraakatan dan Keimigrasian		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
95%	100%	105,2%

Tabel Realisasi IKP-3 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	100

Tabel Perbandingan Realisasi IKP-4 2020-2022

2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
95%	100%	105%	95%	100%	105%	95%	100%	105%

Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun sebelumnya maka realisasi dan capaian kinerja indikator ini masih tetap sama. Keberhasilan pencapaian realisasi yang melebihi target pada indikator ini tidak terlepas dari komitmen dari jajaran pada kedua Politeknik untuk bisa mencetak kader masyarakatan dan imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berkompetensi. Pandemi Covid 19 masih

menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada kedua Politeknik. Pada saat pembelajaran dilaksanakan kembali secara tatap muka, beberapa taruna/taruni terinfeksi Covid 19 sehingga kembali mempengaruhi proses pembelajaran. Untuk mengatasi hal tersebut jajaran kedua Politeknik bertindak cepat dengan mengkarantina taruna/taruni yang terinfeksi pada asrama tersendiri dengan terus dipantau perkembangan kesehatannya.

B. Realisasi Anggaran

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM menerima anggaran sebesar **Rp. 284.182.140.000,-** untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi capaian kinerja yang telah ditentukan dalam Sasaran Strategis dan Sasaran Program dengan indikator kinerjanya. Namun, pada tahun anggaran berjalan, anggaran tersebut mengalami pemotongan

untuk memenuhi kebijakan Automatic Adjustment, sehingga anggaran yang diterima oleh BPSDM Hukum dan HAM menjadi **Rp. 229.437.166.000,-**.

Berikut data penyerapan BPSDM Hukum dan HAM per kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM

Tabel Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.	Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	Rp. 9.964.138.000,-	Rp. 9.278.358.752,-	93,12%
2.	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Rp. 2.881.200.000,-	Rp. 2.822.627.967,-	97,97%
3.	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 11.887.966.000,-	Rp. 11.141.812.491,-	93,72%
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp. 75.033.005.000,-	Rp. 73.570.032.358,-	98,05%
5.	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)	Rp. 41.024.600.000,-	Rp. 40.826.215.537,-	99,52%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)	Rp. 40.605.465.000,-	Rp. 40.480.127.662,-	99,69%
7.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 11.434.479.000,-	Rp. 11.320.648.813,-	99,00%
8.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp. 20.999.928.000,-	Rp. 20.506.419.479,-	97,65%
9.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 15.606.385.000,-	Rp. 15.264.264.439,-	97,81%
TOTAL		Rp. 229.437.166.000,-	Rp. 225.210.507.498,-	98.16%

Dari tabel realisasi anggaran diatas, sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 225.210.507.498,- atau 98,16% dari pagu anggaran sebesar Rp. 229.437.166.000,-. Secara umum semua unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM mampu menyerap anggaran sesuai dengan kegiatannya di atas 90% dari masing-masing anggaran yang dimiliki. Hal ini bisa menjadi gambaran kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang baik. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2021, maka terdapat penurunan angka realisasi anggaran sebesar 0,64% dari angka 98,8%

pada tahun 2021 menjadi 98,16% pada tahun 2022. Salah satu kendala dalam pengelolaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM adalah masih terdapat perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan metode pelatihan dan pelatihan yang berdampak kurang maksimalnya realisasi yang telah dianggarkan.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk menjaga kualitas pengelolaan dan penyerapan anggaran antara lain:

1. Penerbitan pedoman Perencanaan dan Revisi Anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

2. Rapat konsolidasi pimpinan setiap minggu untuk memantau progres capaian kinerja dan realisasi anggaran

C. Capaian Kinerja Anggaran

Untuk mengetahui capaian kinerja anggaran BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 harus dilakukan penghitungan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada

Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA
Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu : Capaian Keluaran, bobot 43,5% Penyerapan Anggaran, bobot 28,6% Efisiensi, bobot 18,2% dan Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap

perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%. Berdasarkan aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/> dapat diketahui nilai SMART DJA BPSDM Hukum dan HAM sebesar **96,95**.

Gambar Nilai Kinerja SMART DJA Tahun 2022



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Sub komponen penilaian IKPA yaitu: Revisi DIPA, bobot 10%, Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%, Data Kontrak, bobot 10%, Penyelesaian Tagihan, bobot 10%, Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%, Dispensasi SPM,

bobot 10%, Penyerapan Anggaran, bobot 20%, Capaian Output, bobot 25%, Berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan dapat diketahui

nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM sebesar **94,43**.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Format Standar : DS343BIB

No	Kode SDI	Nama SDI	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Nilai Total	Kategori	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Rasio)
				Rasio DPA	Salinan Halaman DPA	Penggunaan Anggaran	Bekas Kontribusi	Penggunaan Tergam	Penggunaan SP dan TUP	Disposisi SPM	Capaian Output			
1	01012	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	100.00	77.01	82.01	81.00	96.02	94.00	100.00	100.00	94.43	100%	94.43
			Bobot	10	18	20	40	10	18	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.70	16.40	32.40	9.60	16.92	5.00	25.00			
			Nilai Rasio	80.01				96.94			100.00			

Disclaimer:

Berdasarkan Peraturan Menteri PER/SP/2022, Indikator Revisi DPA dan Penyerapan Anggaran ISM dihitung 9 Triwulan 2022

Dari nilai kedua komponen tersebut kemudian dapat dilakukan penghitungan

untuk mencari nilai capaian kinerja anggaran BPSDM Hukum dan HAM:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai SMART} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (96.95 \times 60\%) + (94.43 \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 58,17 + 37,7$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 95,87$$

Dari hasil penghitungan diatas diperoleh Nilai Kinerja Anggran BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 sebesar 95,87 dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan terkait pengelolaan keuangan yang diambil oleh Para Pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM antara lain:

1. Koordinasi antar Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan para pimpinan satuan

kerja setiap minggu memantau progres pengelolaan anggaran pada masing-masing satuan kerja

2. Tata kelola keuangan berbasis teknologi melalui aplikasi APARAT (Aplikasi Pencatatan Anggaran Real Time dan Akurat) yang dapat memonitor dan memprediksi realisasi anggaran secara *real time* dan akurat.

D. Efisiensi Sumber Daya

Sesuai dengan tema kebijakan fiskal RAPBN 2021 yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, BPSDM Hukum dan HAM senantiasa melakukan penguatan tata kelola sehingga semakin efektif dan efisien, salah satunya dalam bentuk organisasi yang semakin ramping, simpel dan melayani masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi dan informasi dengan baik. Bentuk efisiensi penggunaan sumber daya organisasi dalam mendukung penguatan tata kelola yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan antara lain:

1. Penyederhanaan Birokrasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM antara lain penghapusan sebagian besar struktur Eselon IV dan III. Penyederhaan ini yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi BPSDM Hukum dan HAM yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas PSDM Hukum dan HAa serta mendukung kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi.

2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi Berbasis Teknologi

Penyelenggaraan kegiatan berbasis teknologi sudah mulai menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan termasuk penyelenggaraan pelatihan dan penilaian kompetensi yang menjadi tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM. Sejak pandemi Covid-19 BPSDM Hukum dan HAM sudah menyelenggarakan pengembangan kompetensi berbasis teknologi seperti Pembelajaran Jarak Jauh, *E-learning*, *Blended-Learning*, *Community of Practice*. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi juga memanfaatkan teknologi informasi dengan metode (Computer based Test) pada pelaksanaan SJT (Situational Judgement Test);

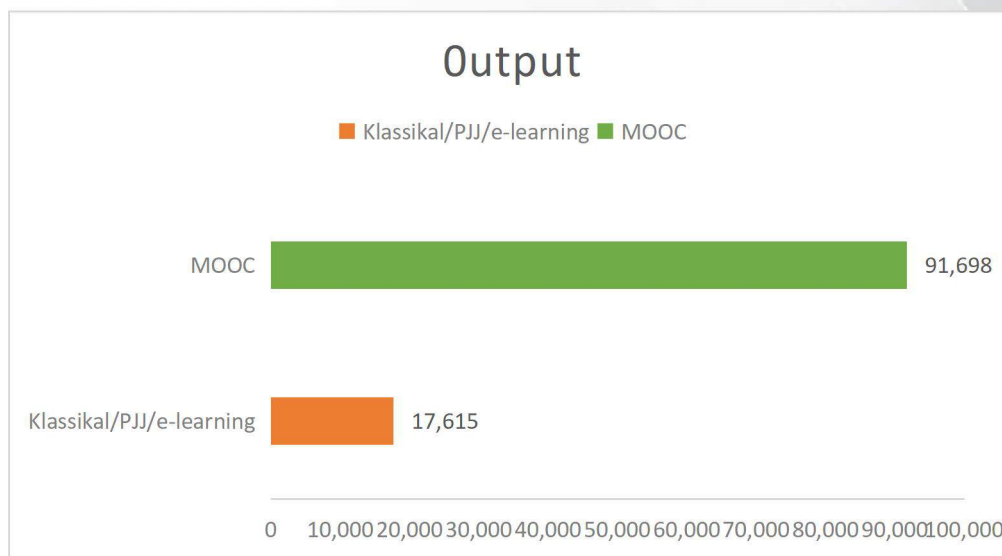
3. Implementasi MOOC Kemenkumham

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pada umumnya adalah keterbatasan waktu akibat banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Salah satu strategi yang digunakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah penerapan *Massive Online Open Course* (MOOC) Kemenkumham. MOOC merupakan metode belajar jarak jauh dengan skala besar dan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja.

MOOC Kemenkumham memberikan kesempatan bagi seluruh ASN Kemenkumham untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sesuai bidang tugasnya tanpa harus mengganggu waktu kerjanya. Untuk tahun 2022 MOOC

Kemenkumham menyelenggarakan dua jenis MOOC yaitu MOOC Reformasi Birokrasi dan MOOC Dasar-Dasar HAM menghasilkan output sebanyak 91.698 peserta.

Grafik Perbandingan Output Pelatihan Klasikal/PJJ dan MOOC



Dari grafik diatas bisa kita lihat perbedaan yang cukup besar dalam hal output yang dihasilkan antara pengembangan kompetensi dengan metode MOOC dan pengembangan kompetensi dengan metode lainnya (Klasikal/PJJ/e-learning). Dapat disimpulkan pula bahwa metode MOOC sangatlah efektif dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana dampak metode ini terhadap kinerja peserta setelah mengikuti pengembangan kompetensi dengan Metode MOOC.

4. Implementasi *e-office*

Pandemi covid-19 yang telah berlalu ternyata membawa pengaruh terhadap pola pelaksanaan kinerja organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM salah satunya kegiatan rapat dengan metode *online*. Pelaksanaan kegiatan Rapat dan koordinasi dengan instansi internal maupun eksternal BPSDM Hukum dan HAM sebagian besar dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi *Zoom* sehingga menghemat anggaran rapat dan perjalanan dinas koordinasi, sehingga anggaran yang ada dapat dialihkan ke hal lain yang lebih diperlukan.

E. Efisiensi Anggaran

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berdasarkan penghitungan efisiensi pada

aplikasi SMART-DJA diketahui Efisiensi BPSDM Hukum dan HAM sebesar **11,92** dengan Nilai Efisiensi sebesar **79,8**. Apabila dikategorikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 maka Nilai Efisiensi BPSDM Hukum dan HAM termasuk dalam kategori **Cukup Efisien**

Gambar Tampilan Aplikasi SMART DITJEN Anggaran



F. Capaian Kinerja Lainnya

1. Aplikasi E-Performance

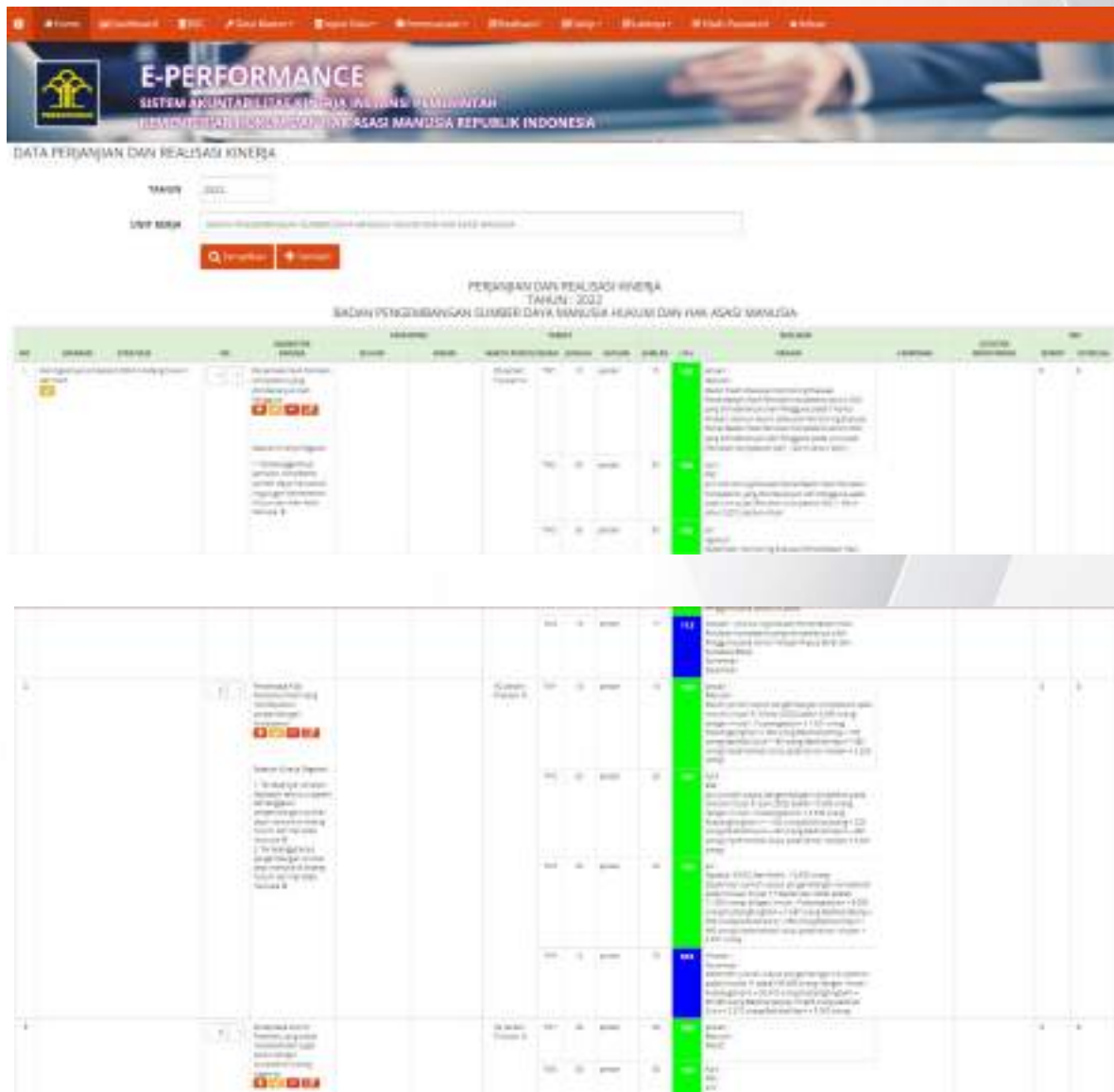
E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit

kerja. Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk mengunggah data capaian kinerjanya pada aplikasi e-performance secara berkala. Dari hasil pengisian data

capaian kinerja tahun 2022 pada laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/> dapat diketahui bahwa realisasi capaian BPSDM Hukum dan HAM melebihi dari target yang telah ditentukan.

Berikut tangkapan layar akun BPSDM Hukum dan HAM pada aplikasi e-performance.

Gambar Tampilan E-Performance



2. Aplikasi E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi

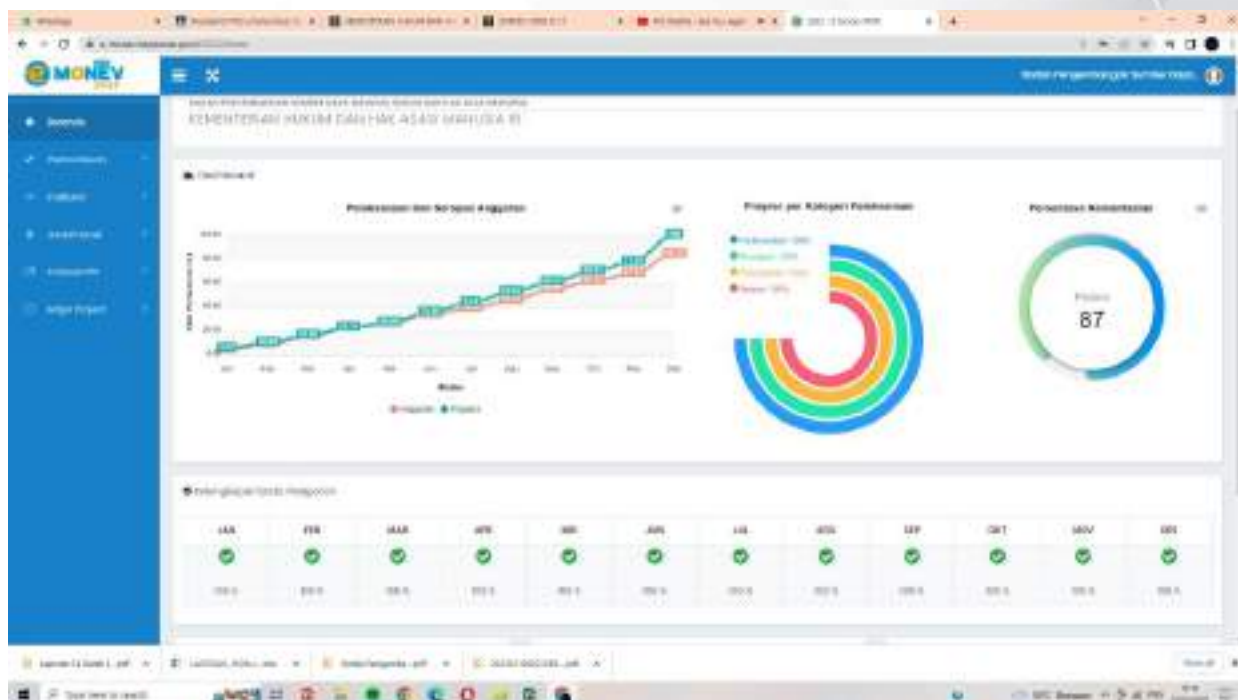
pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan

pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data

realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut tangkapan layar akun aplikasi e-Monev BAPPENA

Gambar Tampilan Aplikasi E-Monev BAPPENAS



Dari gambar diatas secara umum pelaporan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM pada aplikasi ini telah berjalan baik, dimana secara rata-rata presentase pelaporan kegiatan BPSDM Hukum dan HAM sebesar 100%. Hal ini menunjukkan tingkat kedisiplinan unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk melaporkan capaian kegiatan pada aplikasi ini sangatlah tinggi.

Namun masih terdapat kendala yang sering dihadapi pada saat pengisian data pada aplikasi ini antara lain:

1. Aplikasi sering mengalami gangguan pada saat mengisi data dukung capaian;
2. Pada saat terjadi revisi anggaran, anggaran yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan anggaran awal sehingga berdampak pada persentase realisasi anggaran

3. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target kinerja sebagai bentuk percepatan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM wajib dilaksanakan oleh semua Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam target kinerja tersebut telah ditetapkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pencapaian perjanjian kinerja pada unit kerja tersebut, termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Sebagai salah satu Unit Eselon I, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki beberapa Target Kinerja yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pengembangan dan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Target Kinerja Kemenkumham 2022 yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM antara lain:

- 1) Sertifikasi 50 Dosen;
- 2) Pengembangan Kurikulum Pendidikan POLTEKIP dan POLTEKIM;
- 3) Akreditasi POLTEKIM;
- 4) Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum;
- 5) Penilaian Preferensi Kompetensi Metode online di lingkungan Kemenkumham;
- 6) Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi jabatan Administrasi /Fungsional, sebanyak 900 pegawai;

- 7) Peta Jalan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPSDM;
- 8) Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni peserta pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, sebanyak 1.811 alumni peserta pelatihan;
- 9) Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, sebanyak 1.995 alumni peserta pelatihan.
- 10) Mewujudkan Corporate Culture/ Budaya Organisasi BerAKHLAK di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>.

Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Berikut hasil verifikasi terhadap pelaporan data dukung pelaksanaan target kinerja BPSDM Hukum dan HAM

Tabel Capaian Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

NO.	SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET AKSI	Status
1	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Penilaian Preferensi Kompetensi Metode <i>online</i> di lingkungan Kemenkumham	100
2	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Penilaian Kompetensi dan Potensi bagi jabatan Administrasi /Fungsional, sebanyak 900 pegawai	100
3	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Peta Jalan Sistem Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPSDM	100
4	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM		Mewujudkan <i>Corporate Culture</i> / Budaya Organisasi BerAKHLAK di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	100
5	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum	100
6	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni peserta pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan, sebanyak 1.811 alumni peserta pelatihan	100
7	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi alumni pelatihan Tahun 2021 pada Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM, sebanyak 1.995 alumni peserta pelatihan	100
8	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Sertifikasi Dosen POLTEKIP (20 Dosen)	100

9	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Pengembangan Kurikulum Pendidikan POLTEKIP dan POLTEKIM	100
10	Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Akreditasi POLTEKIM	100

Tabel capaian target kinerja diatas menunjukkan bahwa BPSDM Hukum dan HAM telah melaksanakan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan serta data dukung

yang sesuai. Berikut tangkapan layar akun BPSDM Hukum dan HAM pada laman monitoring target kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Gambar Tampilan Aplikasi Target Kinerja

The image shows two screenshots of the 'MONITORING KEMENKUMHAM' application. The top screenshot displays the 'Target Kinerja' (Performance Targets) section, which lists various targets for the BPSDM (Bina Penguatan Sistem Hukum dan HAM) unit. The bottom screenshot displays the 'Detail Capaian' (Performance Details) section, which provides a detailed view of the performance data for a specific target.

Periode	Target Pencapaian	Capaian	Rincian	Data Pendukung	Status
T20-01	Pelaksanaan SK PBI Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	100%	Rincian: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	1. SK PBI Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi 2. Laporan Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	Selesai
T20-02	1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	100%	Rincian: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	1. Laporan Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi 2. Laporan Peta Persebaran dan Indikator Monitoring dan Evaluasi	Selesai

Disamping melaksanakan target kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki kewajiban untuk memvalidasi dan mengevaluasi pelaksanaan target kinerja di lingkungan Kantor Wilayah yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dalam rangka pemenuhan sasaran strategis meningkatkan kompetensi strategis SDM di Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University
- 2) Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah.

Berikut hasil verifikasi terhadap pelaporan data dukung pelaksanaan target kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Tabel Capaian Target Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS	PERJANJIAN KINERJA	TARGET AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN
Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bid. Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi <i>Corporate University</i>	B03: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/bimtek</i> terkait Zona Integritas B06 : Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/</i> terkait Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi B09: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/bimtek</i> terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah B12: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B03: Output sebanyak 3.329 peserta B06: Output sebanyak 6.031 peserta B09: Output sebanyak 2.364 peserta B12: Output sebanyak 1.499 peserta
		Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	B06 Tersusunnya 2 (dua) best practice Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Pemasarakatan dan	B06 66 modul <i>best practice</i>

			Imigrasi	
			B12 Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	B12 66 modul <i>best practice</i>

4. Capaian Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan amanah untuk melaksanakan Prioritas Nasional yang teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada tahun 2022

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan diselenggarakan sebanyak delapan (8) angkatan dengan total 320 peserta dan dengan capaian 100% sedangkan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak delapan (9) angkatan dengan total 270 peserta dan dengan capaian 100%. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Pelatihan SPPA

Pelatihan SPPA				
Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Output	Pagu	Realisai
I (65)	9 Februari-2 Maret 2022	30	Rp. 2.962.525.000,-	Rp. 2.474.546.740,- (83,5%)
II (66)	10-30 Maret 2022	31		
III (67)	6-28 April 2022	29		
IV (68)	31 Mei-22 Juni 2022	28		
V (69)	30 Juni-20 Juli 2022	33		
VI (70)	18 Agustus-1 September 2022	29		
VII (71)	7 September- 21 September 2022	30		
VIII (72)	12-26 Oktober 2022	30		
IX (73)	2-16 November 2022	30		

Tabel Capaian Pelatihan Pembimbing Masyarakat

Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan				
Angkatan	Tanggal Pelaksanaan	Output	Pagu	Realisai
I	23 Februari - 9 Mei 2022	40	Rp. 2.166.121.000,-	Rp. 1.809.723.319,- (83,5%)
II	2 Maret-17 Mei 2022	40		
III	2 Juni - 15 Agustus 2022	40		
IV	14 Juni-23 Agustus 2022	40		
V	28 Juni-6 September 2022	40		
VI	26 Juli-7 Oktober 2022	40		
VII	18 Agustus- 31 Oktober 2022	40		
VIII	30 Agustus-8 November 2022	40		



PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPSDM Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam pengembangan SDM di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk menjalankan perannya tersebut BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang memadai. Besarnya anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dukungan BPSDM Hukum dan HAM dalam memenuhi kebutuhan unit-unit di Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM melakukan realisasi anggaran sebesar Rp. 225.210.507.498,- atau 98,16% dari

total pagu anggaran sebesar Rp. 229.437.166.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya terkandung 9 kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.964.138.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 9.278.358.752,- atau tercapai 93,12%;
2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.881.200.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.822.627.967,- atau tercapai 97,97%;
3. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.887.966.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 11.141.812.491,- atau tercapai 93,72%;
4. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 75.033.005.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 73.570.032.358,- atau tercapai 98,05%;
5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 41.024.600.000,- dan berhasil

- direalisasikan sebesar Rp. 40.826.215.537,- atau tercapai 99,52%;
6. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 40.605.465.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 40.480,127,662,- atau tercapai 99.69%;
 7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.434.479.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 11.320.648.813,- atau tercapai 99.00%;
 8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 20.999.928.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 20.506.419.479,- atau tercapai 97.65%;
 9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut) memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 15.606.385.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 15.264.264.439,- atau tercapai 97.81%.

Selain melaporkan realisasi penyerapan anggaran, laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan capaian strategis yang ditunjukkan oleh BPSDM Hukum dan HAM selama tahun 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian maupun capaian Indikator Kinerja Utama Program BPSDM Hukum dan HAM beserta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Sebanyak 2 IKU Kementerian dari total 2 IKU pada tahun 2022 telah tercapai dan melampaui targetnya. Kedua IKU Kementerian tersebut antara lain:

1. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya dengan realisasi sebesar 94,5% dari target 90% sehingga capaiannya sebesar 105,06%.
2. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan dengan realisasi sebesar 88,21% dari target 75% sehingga capaiannya sebesar 117,6%

Sementara untuk IKU Program BPSDM Hukum dan HAM, dari 4 Indikator Kinerja yang telah ditentukan, semua realisasi indikator melebihi target yang telah ditentukan antara lain:

1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna dengan realisasi sebesar 90,11%. dari target 85% sehingga capaiannya sebesar 106,01%
2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi dengan realisasi sebesar 198,86% dari target 92% sehingga capaiannya sebesar 216,15%;
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya dengan realisasi sebesar 93,8% dari target 92% sehingga capaiannya sebesar 101,9%
4. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan realisasi sebesar 100% dari target 95% sehingga capaiannya sebesar 105,2%

Secara kumulatif besaran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022 adalah 125,32. Nilai ini mengalami kenaikan dari NKO tahun 2022 yang sebesar 109,1. Baik besarnya tingkat pencapaian target IKU maupun kenaikan NKO dari tahun sebelumnya tersebut merupakan cerminan upaya peningkatan kinerja BPSDM Hukum dan HAM ke arah yang lebih baik.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan transformasi kelembagaan, serta upaya aktif antikorupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap sumber daya yang dimiliki.

B. Saran

Meskipun semua indikator kinerja BPSDM Hukum dan HAM telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditentukan, sebagai sebuah organisasi yang terus berbenah, BPSDM Hukum dan HAM secara berkelanjutan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM guna meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan pengembangan kompetensi pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Menyusun pedoman revisi anggaran dalam rangka pembatasan revisi anggaran dan kegiatan
3. Menyusun pedoman pelaporan capaian kinerja dan output kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dilaporkan
4. Implementasi aplikasi PK Bangkom untuk mendata kegiatan pengembangan kompetensi pada seluruh Unit Kerja dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

C. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah perbaikan dalam rangka pemenuhan capaian kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang perlu disusun dan diimplementasikan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Penggunaan aplikasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK Bangkom) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar setiap penyelenggaraan pengembangan kompetensi di wilayah teregistrasi dan bisa dimanfaatkan sebagai data dukung pengembangan kompetensi dan karir aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi PK Bangkom ini, BPSDM Hukum dan HAM memasukkan penggunaan aplikasi PK Bangkom menjadi salah satu Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Sebagai langkah awal dari penggunaan aplikasi PK Bangkom, pada triwulan I tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM akan menyelenggarakan sosialisasi penggunaan aplikasi PK Bangkom ke 33 Kantor Wilayah dengan metode klasikal (tatap muka) dan virtual.
2. Feedback penilaian kompetensi kepada instansi asal peserta uji kompetensi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dalam rangka menyampaikan masukan yang bersifat konstruktif mengenai pengembangan Assessee yang perlu dilakukan oleh pengguna maupun Assessee itu sendiri berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses penilaian kompetensi yang telah dilakukan. Disamping pelaksanaan feedback penilaian kompetensi juga akan diselenggarakan Monitoring pemanfaatan hasil . kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan valid dari peserta penilaian kompetensi tentang persentase hasil penilaian kompetensi yang telah ditindaklanjuti oleh user. Untuk tahun 2023, Pusat Penilaian Kompetensi telah menjadwalkan kegiatan feedback dan monitoring pemanfaatan hasil uji kompetensi ke beberapa Kantor Wilayah antara lain

No.	Nama Kegiatan	Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Feedback Penilaian Kompetensi Di Lingkungan Kanwil Jambi	Klasikal	10 Okt - 12 Okt
2	Monitoring pemanfaatan hasil di Lingkungan Kanwil Jambi	Klasikal	10 Okt - 12 Okt
3	Feedback Penilaian Kompetensi Di Lingkungan Kanwil Sumatera Selatan	Klasikal	17 Okt - 19 Okt
4	Monitoring pemanfaatan hasil di Lingkungan Kanwil Sumatera Selatan	Klasikal	17 Okt - 19 Okt
5	Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kanwil Banten	Klasikal	7 Nov - 9 Nov
6	Monitoring pemanfaatan hasil di Lingkungan Kanwil Banten	Klasikal	7 Nov - 9 Nov
7	Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta	Klasikal	28 Nov - 30 Nov
8	Monitoring pemanfaatan hasil di Lingkungan Kanwil D.I. Yogyakarta	Klasikal	28 Nov - 30 Nov

3. Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan untuk menentukan relevansi kurikulum untuk pelaksanaan tugas lulusan **pelatihan** dan dampak peningkatan kinerja dan dapat memberikan rekomendasi untuk penempatan/lulusan **pelatihan** sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Berikut kegiatan evaluasi pasca pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

No.	Nama Kegiatan	Metode	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula (NTT)	Klasikal	1 Feb - 2 Feb	Fungham
2.	Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula (Jawa Timur)	Klasikal	8 Feb - 10 Feb	Fungham
3.	Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula (Bali)	Klasikal	15 Feb - 17 Feb	Fungham
4.	Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama, Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama	Klasikal	22 Feb - 24 Feb	Fungham

	dan Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula (Sumatera Utara)			
5.	Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Dan Pelatihan Dasar	Klasikal	3 Jul - 7 Jul	Fungham
6.	Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1) Kanwil Bangka Belitung 2) Kanwil NTT 3) Kanwil DI Yogyakarta	Klasikal	Februari-Juni	Tekpim
7.	Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Administrator 1) Kanwil Sumatera Utara 2) Kanwil Jawa Tengah 3) Kanwil Jawa Timur	Klasikal	Agustus Septembr	Tekpim
8.	Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan Nasional II 1) Kanwil Aceh 2) Kanwil NTB 3) Kanwil Papua Barat	Klasikal	Oktober- November	Tekpim

Referensi

1. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024;
2. Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM tahun 2020-2024;
3. Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2021;
4. Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022;
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM tahun 2022;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan tahun 2022;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM tahun 2022;
8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau tahun 2022;
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tahun 2022;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara tahun 2022;
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Ilmu Pemasaran tahun 2022;
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Politeknik Imigrasi tahun 2022;



LAMPIRAN

● PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai pemerintahan yang bersih, jujur, dan akuntabel serta berkeadilan pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Kurnia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Triana H. Luty
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan dari kegiatan pemantauan target kinerja tersebut sesuai dengan jadwal yang tertera.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap laporan kinerja dan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak pertama yang akan diberikan dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Agus Kurnia

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM


Triana H. Luty
NIK 19651118198603001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi keahlian Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang sudah mengikuti pelatihan 2. Persentase ASN yang sudah mengikuti sertifikasi	75% 90%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya G20 Komitmen Hukum dan HAM yang Mendukung Kompetensi di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	1. Persentase pelaksanaan Komitmen lingkup dan Penguatan, dan Peningkatan yang akan diberikan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara dan HAM dan HAM	1. Persentase hasil analisis kompetensi yang dilaksanakan dan penguatan 2. Persentase G20 Komitmen yang dilaksanakan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi jabatan	95% 90% 90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	1. Persentase pelaksanaan Pelatihan dan Penguatan dan Peningkatan yang akan diberikan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	1. Persentase pelaksanaan modul pelatihan dengan standar kompetensi sesuai dan memenuhi 2. Persentase jumlah penyelenggaraan pelatihan fungsional dan teknis 3. Persentase alumni pelatihan jabatan fungsional dan HAM yang mengikuti sertifikasi	95% 90% 90%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terlaksananya pelatihan kompetensi kejuruan aparat Pemasyarakatan Hukum dan HAM	1. Persentase peserta Kompetensi Kejuruan Hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi yang akan diberikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Persentase pelaksanaan pelatihan kompetensi kejuruan Pemasyarakatan Hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi kejuruan 3. Persentase tingkat kepuasan peserta Kompetensi Kejuruan Hukum dan HAM dalam mengikuti pengembangan dan peningkatan kompetensi kejuruan	75% 90% 90%
4.	Terlaksananya pelatihan di bidang Teknik dan Pengembangan	1. Persentase pelaksanaan modul dengan standar kompetensi sesuai dan memenuhi 2. Persentase jumlah penyelenggaraan pelatihan Teknik dan Pengembangan 3. Persentase alumni pelatihan Teknik dan Pengembangan yang mengikuti sertifikasi	95% 90% 90%
5.	Terlaksananya sistem dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	1. Nilai Efektivitas Sistem 2. Nilai OMART 3. Nilai ZIGIP 4. Indeks KPA	81 Nilai 80 Nilai 90% 80 Indeks
6.	Terlaksananya pelatihan di bidang	1. Persentase jumlah penyelenggaraan Pelatihan di Bidang	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 284.983.940.000,-
1.	Pengembangan Pendidikan Kejuruan	Rp. 63.800.000.000,-
2.	Pengembangan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pengembangan dan Peningkatan	Rp. 22.440.000.000,-
3.	Pengembangan Penguatan Kompetensi Aparatur	Rp. 3.807.200.000,-
4.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Pengembangan	Rp. 25.767.365.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 60.827.888.000,-
6.	Pengembangan DKKI Aparatur di Bidang	Rp. 40.630.000.000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia


Agus Kurnia

Pihak Pertama
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM


Triana H. Luty
NIK 19651118198603001



● SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KERUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO.KEP/BSM/01/PIRES/TAHUN 2022

TENTANG
PENYUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memetakan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut secara optimal, maka perlu membentuk tim penyusun;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Jambatan: Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jambatan: Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 700).

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DPAK Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asesik Tahun Anggaran 2022 Nomor SP/DPA-013.12.1.198000/2022 tanggal 12 November 2022.
- BERIMPAT : Keputusan ini mulai berlaku setelah sejak tanggal ditandatangani dengan catatan apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
AS DP KURNIA
NIP. 198211181980001001



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jambatan: Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 700);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/BSM/0004/2022 tentang Pedoman Umum Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022.
- Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asesik Manusa.
- Tim sebagaimana dimaksud akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asesik Manusa Tahun 2022;
- b. Mengkoordinasikan pemenuhan yang tidak terdapat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asesik Manusa;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- d. Menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi Pemerintahan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Asesik Manusa.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : KEP/BSM/01/PIRES/TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Asesik Manusa	Anggota	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
2.	Asesik Manusa	Penanggung Jawab	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
3.	Asesik Manusa	Anggota	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Eksternal Asesik Manusa
Tim Penyusun LKJIP BPSDM Hukum dan HAM Asesik Manusa:			
1.	Asesik Manusa	Koordinator	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
2.	Asesik Manusa	Anggota	Koordinator Bidang dan Asesik Manusa
3.	Asesik Manusa	Anggota	Penyusun dan Pelaksana Kegiatan dan Asesik Manusa
4.	Asesik Manusa	Anggota	Penyusun dan Pelaksana Kegiatan dan Asesik Manusa
5.	Asesik Manusa	Anggota	Penyusun dan Pelaksana Kegiatan dan Asesik Manusa
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asesik Manusa:			
1.	Asesik Manusa	Koordinator	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
2.	Asesik Manusa	Koordinator	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
3.	Asesik Manusa	Koordinator	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

4	Iry-Dharmasari	Spesialis Tia	Sub Koordinator Pelayanan pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan Regenerasi
5	Wagdy Nohad	Anggota	Sub Koordinator Evaluasi dan Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan Regenerasi
6	Jean Samsu	Anggota	Revisi Substansi dan Penetapan pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan Regenerasi
7	Arif Nur Hafid	Anggota	Kepala Lahan dan Substansi pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan Regenerasi
Tim Penyusun LKIP Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM			
1	Sei Falyah	Koordinator	Koordinator Substansi dan Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
2	Herika Siregar	Staf Koordinator	Koordinator Program pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
3	Lidia Mulya	Staf Koordinator	Sub Koordinator Administrasi Pelayanan pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
4	Ajip Handani	Spesialis Tia	Koordinator TU pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
5	Rully Harbi	Anggota	Penyusun dan revisi dan penyusun pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
6	Rizkiy Purnama	Anggota	Penyusun dan revisi dan penyusun pada Pusat Pengembangan Pelayanan Publik dan HAM
Tim Penyusun LKIP Pusat Pelayanan Masyarakat			
1	Kurneli	Koordinator	Koordinator Program pada Pusat Pelayanan Masyarakat
2	NAB Androni	Staf Koordinator	Koordinator Pengembangan dan Pusat Pelayanan Masyarakat
3	Shanti Thania	Staf Koordinator	Koordinator Substansi dan Pusat Pelayanan Masyarakat
4	Nahid	Spesialis Tia	Sub Koordinator revisi dan penyusun pada Pusat Pelayanan Masyarakat
5	Rehanah	Anggota	Revisi dan Penyusun

6	Haris Mulya Laila	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Hary Tri Subdhyono	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Wagdy Nohad R	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Elan Sella Mulya Dini	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Haris Mulya	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Elan Sella Mulya Dini	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Wagdy Nohad R	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Haris Mulya	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Elan Sella Mulya Dini	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Wagdy Nohad R	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Haris Mulya	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Elan Sella Mulya Dini	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Wagdy Nohad R	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Haris Mulya	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Elan Sella Mulya Dini	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Wagdy Nohad R	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun

5	Elan Sella Mulya Dini	Anggota	Revisi dan Penyusun
6	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun
Tim Penyusun LKIP Substansi dan Regenerasi			
1	Haris Mulya	Koordinator	Koordinator Substansi dan Regenerasi
2	Elan Sella Mulya Dini	Spesialis Tia	Koordinator Substansi dan Regenerasi
3	Wagdy Nohad R	Anggota	Revisi dan Penyusun
4	Arif Nur Hafid	Anggota	Revisi dan Penyusun



● **PRESTASI BPSDM HUKUM DAN HAM**

1. Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS



- ## 2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pegadaan Barang/Jasa



NO	INFORMASI	LOKASI	KELOMPOK PENELITIAN	WAKTU BERSAMA
1	Pusat Pengembangan Kecamatan Candi Muncar Kecamatan Agribis Tata Posing/Modul Penerapan Rantai	Agribis	Terpadu a	Setelah 1 tahun kerja terapan diketahui
2	Pusat Pengembangan Kecamatan Candi Muncar Penerapan Rantai	Agribis	Terpadu a	Setelah 1 tahun kerja terapan diketahui
3	Pusat Pengembangan Kecamatan Candi Muncar Penerapan Rantai	Agribis	Terpadu a	Setelah 1 tahun kerja terapan diketahui

3. Peringkat 1 Penilaian Kompetensi Kategori Kementerian Tipe Besar



4. Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan

Dalam perlombaan olimpiade PTK tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 21-26 Agustus 2022. Dari 41 Perguruan Tinggi Kedinasan yang mengikuti, Poltekipp meraih posisi 3 dengan perolehan 7 emas, 8 perak dan 7 perunggu. Sementara Poltekim menduduki posisi 4 dengan perolehan 7 emas, 4 perak dan 5.



PEROLEHAN MEDALI AKHIR
PER 26 AGUSTUS 2022, 18.00 WIB

#	PTK	Emas	Perak	Perunggu
1	STTD Serang	11	3	13
2	PTK STAN	9	6	7
3	POLTEKIP	7	8	7
4	POLTEKIM	7	4	5
5	POLTEKESBIS Bawling	0	1	1
6	POLTEK ALP Jakarta Bogor	3	2	11
7	POLMANESTAN Pagaranda Wiganing	3	2	7
8	POLISTAT STN Jakarta	4	4	1
9	PPI Caring	4	2	8
10	POLTEKBIKSI Bawling	3	3	1



**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**